

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Kebijakan Komandante Stelsel Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang pada Pemilu Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Komandante Stelsel telah dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023. Kebijakan ini diterapkan melalui pembagian wilayah ampunan kepada setiap calon legislatif, mekanisme pelaporan kegiatan secara berkala, serta pengawasan yang dilakukan oleh struktur partai. Dari perspektif Teori New Institutionalism, implementasi kebijakan menunjukkan bahwa aturan formal, norma organisasi, dan mekanisme kelembagaan mampu membentuk perilaku kader agar bergerak secara kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Namun demikian, proses pelembagaan kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih ditemukan perbedaan pemahaman antara pengurus partai dan sebagian calon legislatif mengenai mekanisme serta konsekuensi penerapan Kebijakan Komandante Stelsel. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu institusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh efektivitas sosialisasi, komunikasi organisasi, serta proses internalisasi nilai dan norma kepada seluruh anggota partai.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Kebijakan Komandante Stelsel memberikan dampak positif maupun negatif terhadap calon legislatif internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Magelang. Dampak positif yang paling menonjol adalah meningkatnya konsolidasi internal partai, berkurangnya persaingan antarkader dalam memperebutkan basis suara, semakin efektifnya koordinasi antarelemen organisasi, serta menguatnya kinerja mesin partai hingga tingkat akar rumput. Melalui pembagian wilayah ampunan, setiap calon legislatif memiliki tanggung jawab politik yang lebih jelas sehingga kegiatan kampanye menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan berhasil memperkuat kapasitas kelembagaan partai dalam mendukung strategi kemenangan Pemilu Legislatif Tahun 2024 melalui pendekatan yang lebih kolektif dan berbasis gotong royong.

Di sisi lain, implementasi Kebijakan Komandante Stelsel juga menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi sebagian calon legislatif. Pembatasan wilayah ampunan menyebabkan berkurangnya fleksibilitas dalam memanfaatkan jaringan politik yang telah dibangun sebelumnya sehingga beberapa calon legislatif harus menyesuaikan strategi kampanye dengan wilayah yang telah ditetapkan partai. Selain itu, adanya perbedaan antara mekanisme penetapan calon legislatif berdasarkan sistem proporsional terbuka yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mekanisme internal partai melalui Sistem Perangkingan Suara Mesin (SPSM) memunculkan konflik internal dan persepsi ketidakadilan. Kondisi tersebut menyebabkan terdapat calon legislatif yang memperoleh suara lebih tinggi menurut hasil resmi KPU

tetapi tidak dilantik karena tidak memenuhi ketentuan internal partai. Akibatnya, muncul ketidakpuasan sebagian kader terhadap mekanisme pengambilan keputusan serta menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kebijakan internal partai.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Konsekuensi Politik, implementasi Kebijakan Komandante Stelsel menghasilkan konsekuensi yang diharapkan (*intended consequences*) maupun konsekuensi yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Konsekuensi yang diharapkan tercermin dari meningkatnya efektivitas koordinasi organisasi, menguatnya konsolidasi internal, berkurangnya persaingan antarkader, serta optimalnya kerja mesin partai dalam mendukung strategi kemenangan pemilu. Sebaliknya, konsekuensi yang tidak diharapkan berupa munculnya konflik internal, perbedaan persepsi mengenai mekanisme penetapan calon legislatif terpilih, terbatasnya ruang gerak politik sebagian kader, serta berkembangnya persepsi ketidakadilan terhadap kebijakan internal partai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan organisasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperoleh legitimasi, diterima oleh seluruh aktor organisasi, serta meminimalkan dampak negatif yang muncul selama proses implementasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kebijakan Komandante Stelsel merupakan kebijakan internal partai yang mampu memperkuat efektivitas kelembagaan dan strategi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilu Tahun 2024, namun

implementasinya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan seluruh calon legislatif sehingga memunculkan berbagai dinamika politik internal. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan serupa di masa mendatang sangat bergantung pada peningkatan kualitas sosialisasi, transparansi mekanisme pelaksanaan, penguatan proses pelebagaan nilai dan aturan organisasi, serta penyempurnaan sistem evaluasi dan komunikasi internal agar tercipta keseimbangan antara efektivitas organisasi, keadilan bagi seluruh kader, dan penguatan demokrasi internal partai.

#### **4.2.Saran**

Beranjak dari hasil tersebut, kesenjangan yang terjadi antara elite partai di tingkat DPD dengan para kader dan calon legislatif di tingkat kabupaten perlu segera dibenahi. Guna membangun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang lebih demokratis dan solid, dibutuhkan kerja sama yang baik antara pengurus partai di tingkat atas dengan kader yang bekerja langsung di lapangan. Ke depannya, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan bahwa setiap calon legislatif, terutama mereka yang terdampak langsung oleh kebijakan internal partai, dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan ini dapat dilakukan melalui forum diskusi terbuka, rapat kerja yang lebih partisipatif, atau mekanisme konsultasi yang memberikan ruang bagi kader untuk menyampaikan pendapat dan keberatan secara resmi. Selain itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik internal yang inklusif dan praktis, sehingga perselisihan antara kader dengan keputusan partai tidak harus berakhir dengan pengunduran diri atau kekecewaan

yang berlarut-larut. Para calon legislatif juga perlu meningkatkan kapasitasnya dalam memahami aturan dan mekanisme internal partai, termasuk dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif dengan pengurus partai di semua tingkatan.

Selama melakukan penelitian, peneliti menemui beberapa hambatan yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Peneliti mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen internal partai yang tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga beberapa data mengenai dinamika pengambilan keputusan di internal DPD dan DPC tidak dapat diperoleh secara lengkap. Selain itu, sebagian informan yang terdampak langsung enggan berbicara secara terbuka karena kekhawatiran terhadap konsekuensi politis yang mungkin mereka hadapi, sehingga kedalaman data yang diperoleh menjadi kurang maksimal.

Selanjutnya, masih diperlukan studi-studi lebih lanjut mengenai dampak kebijakan internal partai politik terhadap hak politik kader dan calon legislatif di daerah lain di Indonesia. Melalui penelitian ini, peneliti berharap akan semakin banyak penelitian yang mengkaji praktik demokrasi internal partai politik di tingkat lokal. Selain untuk memperkaya referensi akademis dalam bidang ilmu pemerintahan dan politik, hal ini juga bertujuan untuk mendorong partai politik agar lebih serius dalam membenahi mekanisme internal mereka agar lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh kadernya.